KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

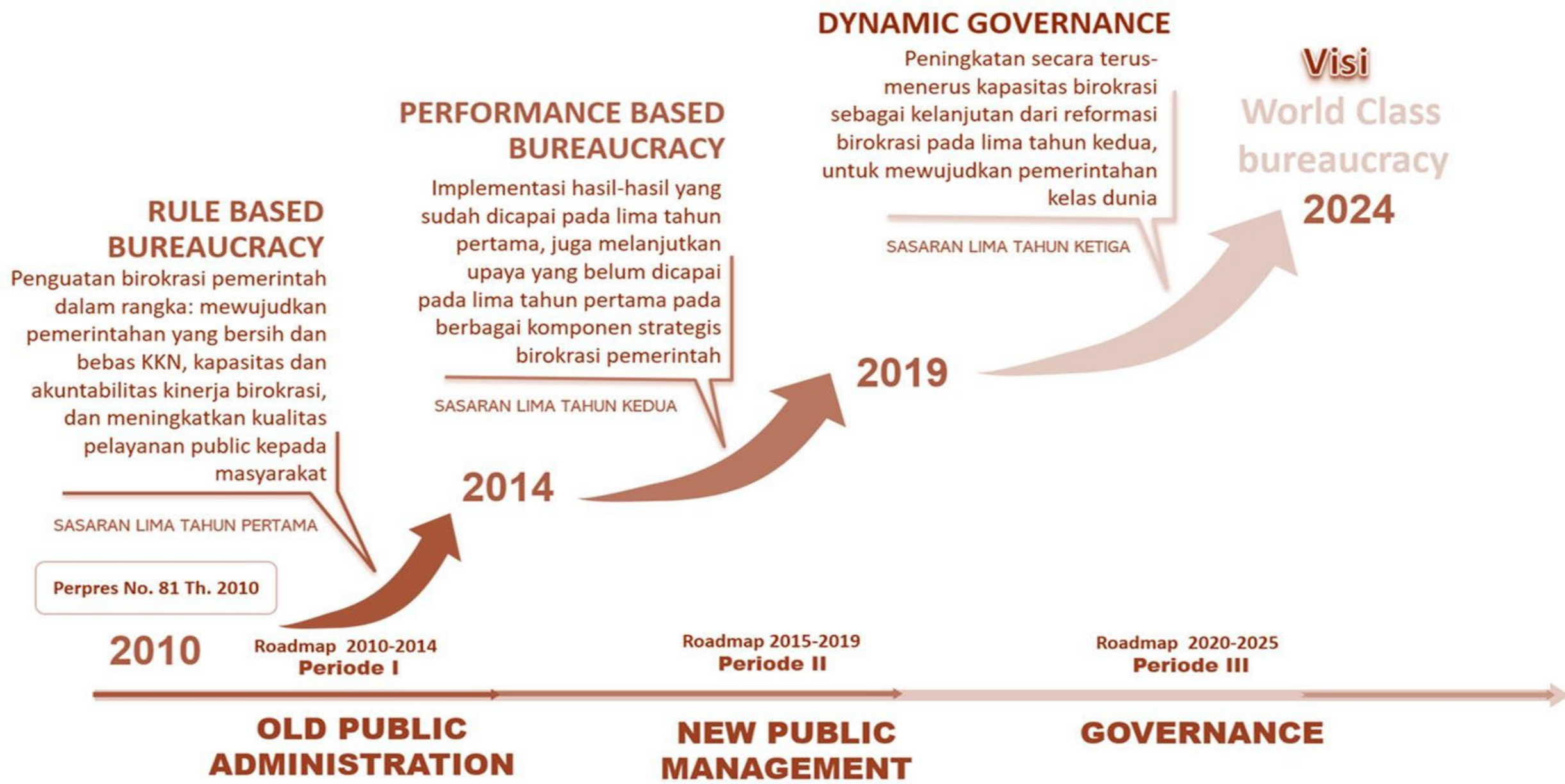


http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Dasar Hukum Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

- **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;**
- **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024**

MANDAT PERRES 81/2010
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2020-2024



TUJUAN:
Terciptanya Birokrasi yang Berdaya Saing, Bersih, dan Efektif untuk Mendorong Pembangunan Nasional dan pelayanan publik

focus Strategi pencapaian tujuan

GENERAL

Penyelesaian isu hulu yaitu tata Kelola pemerintahan di internal birokrasi

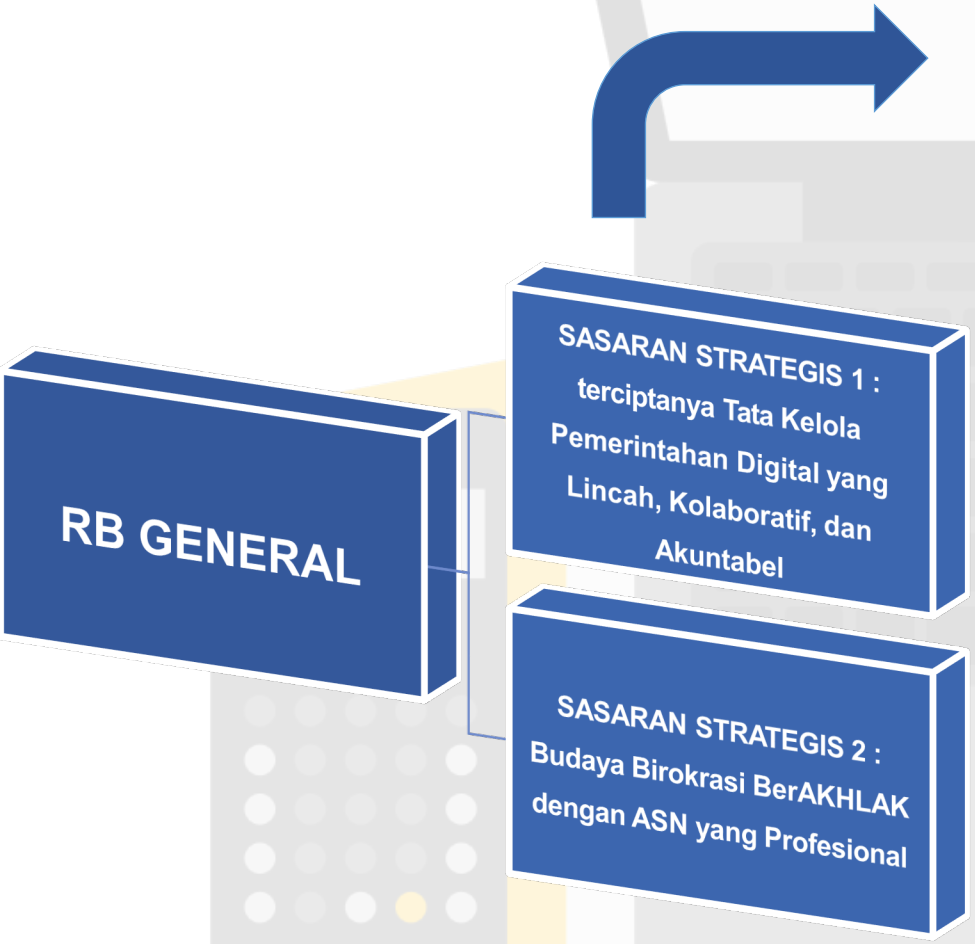


TEMATIK

penyelesaian isu hilir yang menajdi prioritas pembangunan nasional/daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat

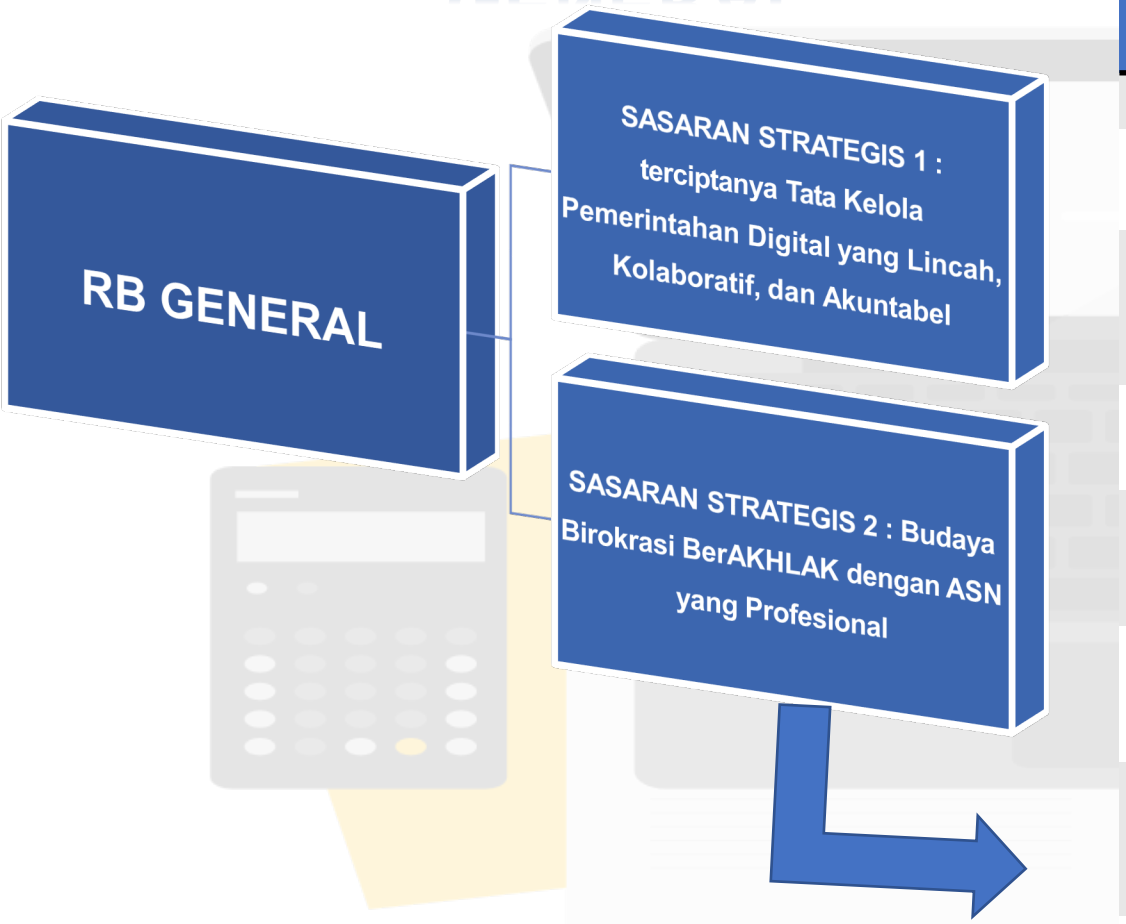


REFORMASI BIROKRASI GENERAL



Sasaran (*Immediate Outcome*)		Kegiatan Utama
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel		
S. 1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
S. 2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN
S. 3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
S. 4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
S. 5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S. 6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S. 7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
S. 8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
S. 9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

REFORMASI BIROKRASI GENERAL



Sasaran (Immediate Outcome)		Kegiatan Utama
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Pelaksanaan Learning and Development dan Digital Mindset ASN
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai ASN yang efektif dan efisien
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Pelaksanaan transformasi digital ASN
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit Pelaksanaan Core Values ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

1. Pengentasan Kemiskinan

perbaikan tata Kelola penanggulangan kemiskinan sehingga program2 dapat tepat sasaran



2. Peningkatan Investasi

mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat kebijakan2 daerah dan dukungan program kegiatan

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital dan memberikan kemudahan dala pendataan sectoral di wilayah, missal untuk program prevelansi stunting

4. Percepatan Prioritas actual presiden

merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi

#NGANJUK BANGKIT

HASIL EVALUASI RB KAB. NGANJUK 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	KOMPONEN PENGUNGKIT			
	I. Pemenuhan	20,00	9,15	9,56
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,55	5,75
	III. Reform	30,00	14,87	16,26
	TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	60,00	28,57	31,57
B.	KOMPONEN HASIL			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,53	7,66
2	Kualitas pelayanan Publik	10,00	8,61	6,68
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,26	8.32
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,07	5,95
	TOTAL KOMPONEN HASIL	40,00	30,47	28,61
	INDEKS RB (PENGUNGKIT + HASIL)	100,00	59,04	60,18

Hasil Antara Area Perubahan (komponen pengungkit)

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	190,0	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	36,17	-	LAN
3.	ASN yang Profesional	0-100	68,3	46,43	BKN
4.	Implementasi SPBE	0-5	2,14	2,18	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	32,84	55,80	LKPP
6.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,71	3,32	Kementerian PANRB
7.	Maturitas SPIP	0-5	2	3	BPKP
8.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
9.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	45,1	65,67	Ombudsman RI
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	61,74	80,54	ANRI

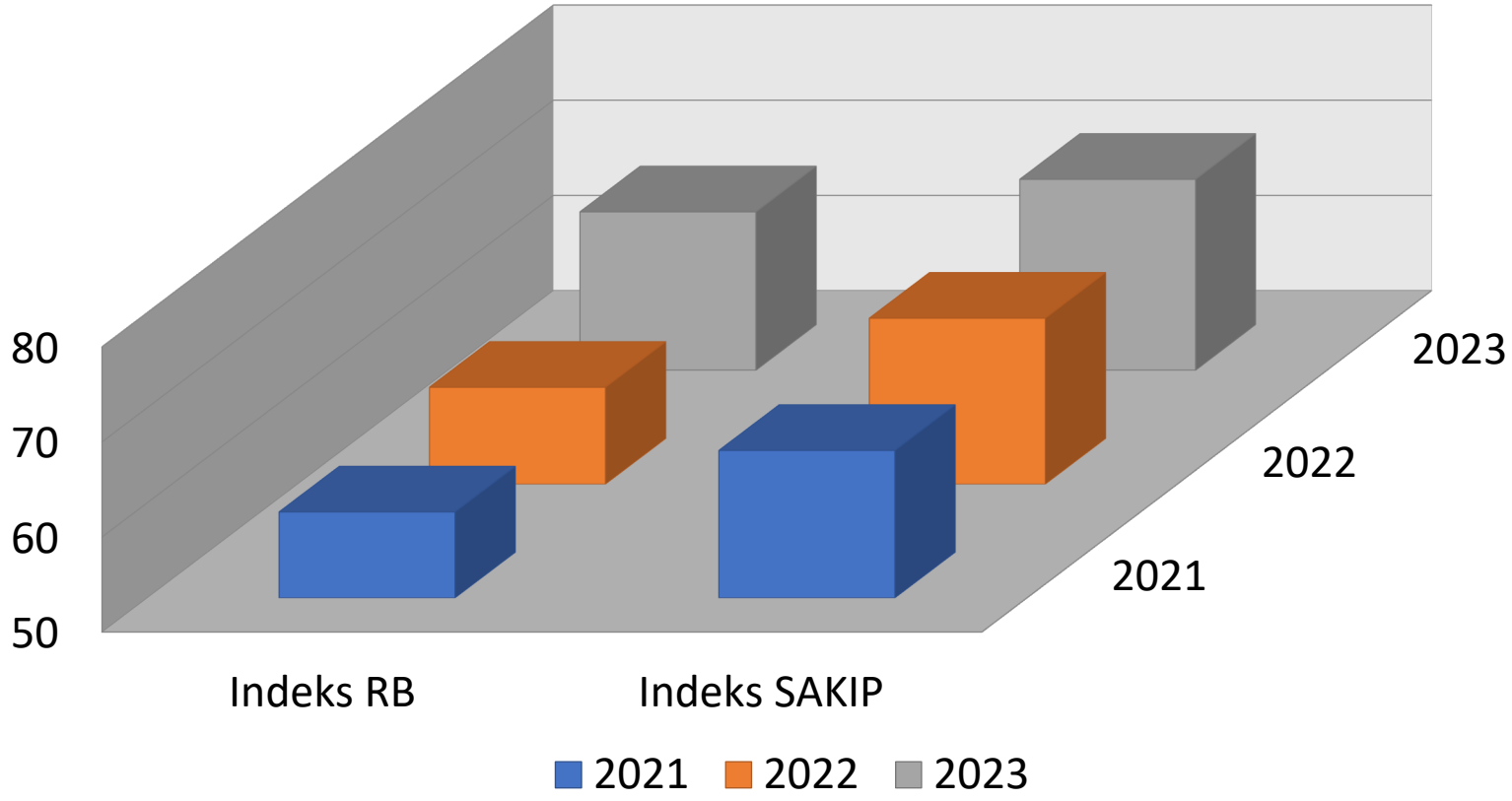
Hasil Penilaian Komponen Hasil RB 2021 -2022

No	Komponen Hasil	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Opini BPK	WTP	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	65,51	66,59	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	86,11	66,80	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	82,56	83,23	SPI Eksternal KPK
5.	Survei Internal Organisasi	75,36	79,98	SPI Internal KPK

Tahun 2023 menggunakan permenpanRB no.03/2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	63,66
B	RB Tematik	20	2,99
C	Indeks RB	120	66,65
			B

PERKEMBANGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP2021-2023



	2021	2022	2023
Indeks RB	59,04 (C)	60,18 (B)	66,65 (B)
Indeks SAKIP	65,51 (B)	67,45 (B)	70,07 (BB)

PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB.NGANJUK 2021-2023

PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH										TIM PENILAI
NO	INDEKS PENILAIAN	TAHUN								
		2024		2023		2022		2021		
1	Kepatuhan Standart Pelayanan publik	Zona Hijau	97,84	Zona Hijau	97,29	Zona Kuning	65,67	Zona Merah	45,1	OMBUDSMAN RI
2	Indeks Pelayanan publik			A- (Sangat Baik)	4,1	B- (Baik dengan Catatan	3,32	C (Cukup)	2,71	Kemenpan RB
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Sangat Baik	3,62	Cukup	2,18	Cukup	2,14	Tim Koordinasi SPBE Nasional
4	Kualitas pengelolaan ARSIP			A (Memuaskan)	84, 63	A (Memuaskan)	80,54	B(Baik)	61,74	Arsip Nasional RI

SELESAI DAN TERIMA KASIH